



Cegah Korupsi, Kejari Kumpulkan Perbekel

Dana Desa Capai Rp 764 Triliun

Denpasar (Bali Post) -

Mewujudkan program Nawacita Presiden RI Joko Widodo, pemerintah pusat menggelontorkan dana desa senilai Rp 764 triliun untuk desa di seluruh Indonesia. Sebagian kecil dana tersebut juga diterima 73 desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Besarnya dana desa yang dikelola perbekel tentu harus mendapatkan pengawasan dari Kejaksaan.

Kamis (24/8) kemarin, Kajari Denpasar Erna Nornawati Widodo Putri selaku Ketua Tim Pengarah dan Pengendali TP4D Denpasar, bersama Ketua TP4D Denpasar I Gusti Ngurah Agung Kusumayasa Diputra mengumpulkan seluruh perbekel di Denpasar dan Badung. Mereka diajak menyamakan persepsi dan melakukan pengawalan dana desa sehingga tidak menyimpang dari peruntukannya, yakni pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

Kajati Bali Jaya Kesuma yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, TP4D sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. "Setelah direncanakan, kami harap tidak ada lagi penyerapan anggaran

rendah, tidak ada kegalauan para perbekel atau kades dan tidak ada lagi merasa diskriminalisasi, sehingga pembangunan berjalan lancar," jelas Kajati Jaya Kesuma sembari menambahkan, kalau tidak diindahkan setelah dilakukan pembinaan dan masih ada perbekel nakal, akan dilakukan penegakan hukum.

Kajari Denpasar Erna Normawati menambahkan, dalam pengelolaan dana desa ini masyarakat harus dilibatkan. Ia mengatakan kepada 73 perbekel bahwa penggunaan dana desa harus transparan dan diumumkan di area public, sehingga dana desa tersebut tidak disalahgunakan.

Pada kesempatan itu, Kajari Nor-

Edisi : Jumat, 25 Agustus 2017

Hal : 5



Bali Post



mawati Widodo Putri sempat mengetes sejumlah kades tentang dana desa yang diterima. Beberapa kades lupa dana desa yang sudah diterima walau sebagian besar ingat. "Dana desa diterima *kagak tau*, nanti minta lagi," kata Erna dengan nada sedikit bercanda. Bahkan, ada kepala desa yang grogi saat ditanya soal jumlah dana desa yang sudah diterimanya.

Kasi Intel Kusumayasa Diputra menambahkan, sosialisasi ini sangat penting mengingat dana desa mencapai Rp 764 triliun secara nasional. Besarnya dana sangat perlu pengawasan dan kewaspadaan dalam penggunaannya. Jangan sampai membuat penyimpangan yang berujung pada pidana korupsi hingga kepala desa masuk pengadilan tipikor.

Kadis DPMD Denpasar I.B. Alit Wiradana menyatakan pihaknya sudah melakukan pembinaan ke desa-desa. Yang sudah disalurkan ke Pemkot Denpasar untuk 27 desa di empat kecamatan Rp 28,4 miliar.

Tahap pertama Rp 17 miliar lebih dan tahap kedua Rp 11 miliar lebih. Progres penggunaan desa sampai 18 Agustus 2017 total Rp 12,7 miliar.

Sementara itu, Kadis DPMD Badung Sridana mengatakan, penyaluran dana desa sama dari pusat, yakni diterima dari rekening kas negara ke rekening kas daerah. Pencairan dana untuk 46 desa dilakukan bertahap. Badung telat menerima yakni awal Agustus. Dalam sebulan, dana desa yang diterima Rp 40.345.347.203,43. Pencairan tahap I Rp 24.189.371.400,00, sedangkan penggunaannya sudah Rp 15.684.691.757,68 atau 64,48 persen.

Dikatakannya, pengawasan dana desa sangat perlu untuk ketepatan lokasi penyaluran yang berhak menerima, syarat, waktu, jumlah dan penggunaan. Permasalahan yang terjadi di lapangan, transfer dana dari RKUN belum sesuai tahapan pencairan, klasifikasi kegiatan belum sepenuhnya, kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa. (kmb37)

Edisi : Jumat, 25 Agustus 2017

Hal : 5